

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Perkembangan teknologi dan pembangunan yang pesat di berbagai belahan dunia membuat negara berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas mereka agar tidak tertinggal dan dapat berpartisipasi aktif di dunia internasional. Salah satu kualitas penting dalam pembangunan negara dan kerjasama internasional adalah sumber daya manusia dimana generasi muda memainkan peranan yang kuat dalam menentukan masa depan negara dan dunia bertahun-tahun kedepan. Namun di era pembangunan tersebut, masalah hak asasi manusia masih menjadi hambatan yang sangat kuat khususnya bagi anak-anak sebagai generasi muda penentu masa depan bangsa. Salah satu masalah terkait hak asasi ini yang cukup berdampak adalah terkait pernikahan anak yang tentunya melanggar dan menyelewengi hak-hak dan kebutuhan anak.

Pernikahan anak menjadi benalu yang banyak menghancurkan masa depan khususnya anak perempuan. Adanya pandangan patriarki yang rendah terhadap anak perempuan mengakibatkan mereka tidak dapat mengembangkan potensinya dengan baik dan bahkan tidak diperhitungkan posisinya oleh beberapa masyarakat negara.

Nigeria merupakan salah satu negara dengan kasus pernikahan anak terbesar. Hal ini membawa kekhawatiran tidak hanya bagi pemerintahnya melainkan juga masyarakat internasional dikarenakan pernikahan anak menjadi penyebab besar terhadap kurangnya sumber daya manusia berkualitas serta partisipasi ekonomi dan ilmu pengetahuan bagi perkembangan negara dan kerjasama internasional. Banyaknya faktor yang menyebabkan kasus ini terjadi memberikan beban yang besar bagi negara dan aktor internasional untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, sejumlah aktor non negara banyak yang terpanggil untuk membantu mengurai benang kusut dari permasalahan pernikahan anak yang telah lama membudaya salah satunya di Nigeria.

Girls Not Brides merupakan salah satu aktor organisasi non negara yang memiliki keinginan dan komitmen yang kuat untuk meminimalisir kasus pernikahan anak. Dalam mewujudkan perannya, *Girls Not Brides* menargetkan untuk memastikan perlindungan terhadap anak perempuan di berbagai negara salah satunya di Nigeria dalam hak-haknya

dan bidang hukum, kemudian juga memastikan ketersediaan layanan terbaik bagi anak perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, keterampilan dan perlindungan diri. *Girls Not Brides* juga berupaya merangkul masyarakat melalui kerjasama sosialisasi dengan komunitas di berbagai bidang. *Girls Not Brides* juga berupaya memastikan anak perempuan bebas menentukan masa depannya dan tidak terdiskriminasi oleh berbagai stigma dan budaya yang ada di masyarakat.

Menurut Biddle dan Thomas, peran diwujudkan dalam bentuk perilaku (*performance*) dari aktor yang terlibat, dimana wujud perilaku ditunjukkan secara nyata dan bukan sekadar harapan atau norma. Dalam menjalankan perannya, *Girls Not Brides* bekerjasama dan mendukung program pemerintah *National Strategy to End Child Marriage in Nigeria / Strategi Nasional Untuk Mengakhiri Pernikahan Anak di Nigeria*, dengan menjalankan *Theory of Change* atau Teori Perubahannya yang terdiri dari empat pilar yaitu memberdayakan perempuan, memobilisasi keluarga dan komunitas, menyediakan layanan, dan menetapkan dan menerapkan hukum kebijakan. Keempat pilar tersebut memiliki program masing-masing yang dijalankan oleh *Girls Not Brides* untuk mencapai tujuan dari visi dan misinya.

Program-program yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh *Girls Not Brides* merupakan bentuk upaya dukungan terkait kolaborasinya bersama pemerintah. *Girls Not Brides* membentuk koalisi dan berkolaborasi bersama jaringan pemerintah Nigeria dan berkomitmen untuk menangani pernikahan anak. Dalam memastikan tujuannya tercapai, *Girls Not Brides* mengawal kebijakan pemerintah dan memastikan strategi nasional Nigeria dapat tercapai dan berjalan dengan baik.

Dalam konsep relasi atau pola hubungan *International Non Governmental Organization* (INGO) dan Pemerintah Negara menurut James V. Ryker, hubungan *Girls Not Brides* dengan pemerintah Nigeria termasuk kedalam kategori *Collaboration/Promotion* dimana kerjasama yang terjalin bersifat saling menguntungkan antara kedua belah pihak yaitu bagi pemerintah Nigeria dan *Girls Not Brides*. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya visi misi yang sama yaitu untuk mengupayakan penurunan dan penghapusan dari praktik pernikahan anak di Nigeria.

Kehadiran *Girls Not Brides* di Nigeria, direspon dengan sangat baik oleh pemerintah Nigeria dikarenakan kehadiran *Girls Not Brides* menjadi dukungan yang besar untuk memastikan tercapainya tujuan jangka panjangnya yaitu *National Strategy to End Child Marriage in Nigeria / Strategi Nasional Untuk Mengakhiri Pernikahan Anak di Nigeria*.

Selain itu, bagi *Girls Not Brides* kerjasama ini dapat memperluas relasi serta mencapai visi dan misi organisasi mereka terkait upaya meminimalisir pernikahan anak. Adanya dukungan dari pemerintah membuat segala perizinan terhadap kegiatan atau program yang akan dilaksanakan menjadi jauh lebih mudah.

Peran dan visi misi yang ditargetkan *Girls Not Brides* di Nigeria tentunya tidak selalu menemui jalan yang mulus. Ada banyak tantangan yang dihadapi dalam prosesnya. Dalam mewujudkan programnya memberdayakan anak perempuan Nigeria, *Girls Not Brides* harus dapat memberikan keyakinan dan rasa aman untuk anak perempuan agar mereka mau terbuka dengan masalahnya sehingga *Girls Not Brides* dapat memberikan perlindungan dan konsultasi terhadap anak perempuan yang terancam menikah maupun bagi yang ingin meninggalkan pernikahan dikarenakan hak-hak yang tercederai. Selain itu meyakinkan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum universal di Nigeria terkait usia minimum menikah juga menjadi tantangan yang cukup berat. Hal ini ditambah dengan adanya norma dan aturan dari masyarakat yang tidak mudah diubah dan bahkan melangkahi aturan hukum formal di Nigeria. Tantangan dalam mendapatkan kepastian hukum ini masih terus di diperjuangkan oleh *Girls Not Brides* bersama dengan organisasi / LSM anggota di Nigeria.

Kabar baiknya, dibalik tantangan besar yang dialami, *Girls Not Brides* tidak sendirian dalam upayanya meminimalisir kasus pernikahan anak di Nigeria. Ada banyak aktor multinasional yang memberikan dukungan, baik secara tindakan dan juga finansial. Upaya meminimalisir pernikahan anak di Nigeria di dukung oleh beberapa aktor besar seperti Uni Eropa, *UNFPA*, *USAID*, *Save the Children* dan *UNICEF* dalam penyediaan sumber daya berupa teknis dan keuangan juga turut bekerjasama dengan *Girls Not Brides* untuk mengimplementasikan strategi pemerintah Nigeria dalam mencapai *SDG's* dan *MDG's*.

Girls Not Brides mendapat sambutan yang hangat dari pemerintah Nigeria dengan berkolaborasi atau berkoalisi bersama untuk memastikan kasus pernikahan anak dapat diminimalisir. Adanya dukungan dan antusias dari anak-anak di Nigeria yang bersekolah juga sangat membantu dalam memberikan inspirasi dan semangat bagi anak-anak lain di Nigeria yang terancam dinikahkan.

Selain itu, partisipasi dukungan positif dari berbagai media massa memberikan kemudahan bagi *Girls Not Brides* dalam menyebarkan informasi dan pemahaman bagi masyarakat sosial tidak hanya di Nigeria tapi juga di negara lainnya. Dari penyebaran

informasi massal tersebut diharapkan pemahaman masyarakat Nigeria berangsur-angsur dapat berubah dan partisipasi untuk ikut mengakhiri pernikahan anak di Nigeria meningkat di berbagai kalangan.

Peran *Girls Not Brides* dalam meminimalisir pernikahan anak / Child Marriage di Nigeria penulis nilai berdampak dengan cukup baik terbukti sejak kehadiran *Girls Not Brides* kasus pernikahan anak di Nigeria cenderung menurun. Secara sempit bukti keberhasilan juga dapat dilihat dari penerapan program-program dari keempat pilar *Theory of Change* atau Teori Perubahannya yaitu memberdayakan perempuan, memobilisasi keluarga dan komunitas, menyediakan layanan, dan menetapkan dan menerapkan hukum kebijakan. Meskipun upaya untuk menyelaraskan hukum terkait usia minimal menikah yaitu 18 tahun di seluruh negara bagian di Nigeria belum tercapai, namun di bidang-bidang lainnya *Girls Not Brides* berhasil menjalankan programnya dengan baik dan tentunya keberhasilan itu juga berkat dukungan dan kerjasama dari pemerintah serta partisipasi yang aktif dari lembaga internasional lainnya seperti Uni Eropa, *UNFPA*, *USAID*, *Save the Children* dan *UNICEF* yang turut mendukung pemerintah Nigeria dalam menerapkan strategi nasionalnya untuk mengakhiri pernikahan anak.

1.2 Saran

Dari segala program yang telah dijalankan oleh *Girls Not Brides* dalam meminimalisir pernikahan anak di Nigeria, sebagai partner kolaborasi hal pertama yang harus diperjuangkan oleh *Girls Not Brides* adalah memastikan pemerintah Nigeria untuk lebih tegas lagi dalam menetapkan hukum kepada seluruh negara bagiannya. Segala upaya dan strategi baik dari pemerintah Nigeria maupun *Girls Not Brides* butuh pondasi yang kuat, dan penetapan hukum universal terkait usia minimum pernikahan anak di Nigeria adalah pondasi yang harus diperjuangkan. Segala upaya baik sosialisasi dan pemberian fasilitas kepada masyarakat pada akhirnya dapat goyah apabila pondasi ini tidak segera diperbaiki dan ditegaskan. Dibutuhkan sebuah sanksi dan perjanjian yang mengikat agar setiap negara bagian Nigeria dapat patuh terhadap hukum yang telah ditetapkan dan disepakati. Dibutuhkan juga transparansi atau laporan yang jelas serta pembaharuan data-data terkait pernikahan anak secara rutin dari pemerintah Nigeria terhadap perkembangan penerapan strateginya agar *Girls Not Brides* dan organisasi partner lainnya dapat mengevaluasi dan mengukur tingkat keberhasilan program lebih jelas. Hal ini juga akan memudahkan *Girls*

Not Brides dan organisasi partner lainnya untuk membuat inovasi program baru untuk meminimalisir pernikahan anak dengan lebih efektif di masa depan. Peningkatan kinerja media massa khususnya di dalam negeri (Nigeria), juga sangat penting untuk ditegaskan. Aktor media massa di Nigeria, pembuat kebijakan dan pemikir perlu mempertahankan dan meningkatkan perhatian mereka dan menjadikan pernikahan anak sebagai isu prioritas. Hal ini nantinya dapat memudahkan penyampaian informasi dan membuat masyarakat menyadari bahwa kasus pernikahan anak ini adalah masalah yang penting.